

**PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM MENUNJANG
KESEMPATAN KERJA DI DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II BONE**



BUSUWA

OLBB

HUSAIN

No. Stb/Nirm ; 4587010258/8811301260

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN

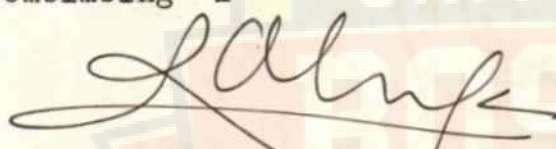
Judul : PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM MENUNJANG
KESEMPATAN KERJA DI DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN BONE

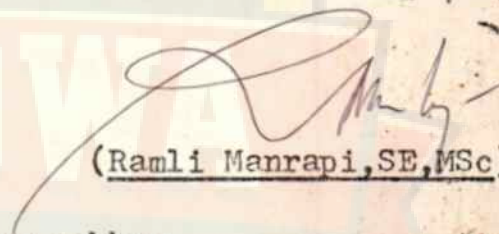
Nama Mahasiswa : H U S A I N
Nomor STB / NIRM : 4587010258 / 8811301260
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


(Prof. Dr. H. Raharja Adisasmita, MEc)


(Ramli Manrapi, SE, MSc)


Mengetahui dan Mengesahkan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Ujung Pandang

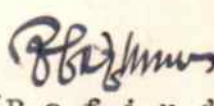
Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Universitas "45"

dan Studi Pembangunan


(Drs. Palipada Palisuri)


(Rafiuddin, SE)

Tanggal Pengesahan :

HALAMAN PENERIMAN

Pada hari / tanggal : Senin / 7 Desember 1992
Skripsi atas nama : H U S A I N
Nomor STB / NIRM : 45870101258 / 8811301260

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Pengawasan Umum :

1. Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid. (.....)
(Rektor Universitas "45" Ujung Pandang)
2. Prof. Dr. H. A. Karim Saleh. (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS)

Ketua : Drs. Palipada Palisuri (.....)

Sekretaris : Syamsuddin, S.E. (.....)

Anggota Penguji :

1. Drs. Amirullah BM, M.Sc. (.....)

2. Drs. Djabir Hamzah, MA. (.....)

3. DR. H. Muchsin Rahim, S, MEC. (.....)

4. Drs. Nuhun Ahmad, M.S. (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM MEMUNJANG KESEMPATAN KERJA DI DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BONE".

Salawat dan taslim penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabatnya yang mana beliau rela berkorban demi menegakkan kalimat Allah dipersad bumi.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam bentuk pemikiran maupun data serta fasilitas-fasilitas lainnya, kiranya sulit untuk menyelesaikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat.

1. Bapak Drs. Palipada Palisuri, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" atas bantuan dan penyediaan fasilitas yang memungkinkan penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Rafiuddin, SE, Ketua Jurusan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

3. Prof.Dr.H.Raharjo Adisasmita, MEc, selaku Pembimbing I dan begitu pula bapak Ramli Manrapi, SE, MSc. selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi petunjuk, sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi penulis.
4. Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Universitas "45" mulai dari duduk dibangku kuliah sampai menyelesaikan studi.
5. Para Pimpinan Departemen/Instansi/Lembaga yang telah memberikan informasi data-data yang sangat bermanfaat dalam penulisan ini.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah memelihara, memberikan bantuan materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
7. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah memberikan bantuan mañai duduk di bangku kuliah sampai selesainya skripsi ini.

Akhirnya, semoga atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin .

Ujung Pandang,

1992

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan	4
1.4. H i p o t e s i s	4
1.5. Tata Urut Bahasan	5
BAB II. KERANGKA TEORI	
2.1. Masalah dan Pengertian Tenaga Kerja	6
2.2. Masalah Tenaga Kerja	8
2.3. Pengertian Tenaga Kerja	10
2.4. Pengangguran	14
2.5. Sektor Informal	17
2.6. Pedagang Kaki Lima	29
BAB III. M E T O D O L O G I	
3.1. Daerah Penelitian	35
3.2. Jenis dan Sumber Data	35
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4. Metode Analisis	36

3.5. Konsep Operasional	37
BAB IV. PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM MENUNJANG KESEMPATAN KERJA	
4.1. Sektor Informal dan Tenaga Kerja ..	39
4.2. Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Ka- bupaten Bone	42
4.3. Perhitungan Analisis Tentang Sektor Formal dan Informal	48
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
5.1. Simpulan	58
5.2. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL I.1. JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR INFORMAL DAN FORMAL DI KABUPATEN BONE TAHUN 1987 - 1991	3
TABEL IV.1. PERKEMBANGAN PENDUDUK TIAP KECAMATAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BONE TAHUN 1986 - 1990	43
TABEL IV.2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN DALAM KABUPATEN BONE KEADAAN TAHUN 1991	44
TABEL IV.3. TENAGA KERJA YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 1991	46
TABEL IV.4. TENAGA KERJA YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 1990	47
TABEL IV.5. BANYAKNYA PENCARI KERJA TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN BONE TAHUN 1991 ...	48
TABEL IV.6. TINGKAT TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL TAHUN 1988 - 1991	52
TABEL IV.7. TINGKAT TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL TAHUN 1988 - 1991	53
TABEL IV.8. JUMLAH PENGANGGURAN DAN PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BONE TAHUN 1990	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
LAMPIRAN 1. JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BONE TAHUN 1991	63
LAMPIRAN 2. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA MENURUT KE- CAMATAN DI KABUPATEN BONE TAHUN 1987- 1990	64
LAMPIRAN 3. REALISASI PENGELUARAN DAERAH OTONOM TINGKAT II BONE TAHUN ANGGARAN 1990/ 1991 DALAM MILYAR RUPIAH	65



BAB I
P E N D A H U L U A N



1.1. Latar Belakang

Negara kita dikenal sebagai negara agraris, di mana sebahagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, namun demikian bukan berarti bahwa semua masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian, menurut Kantor Biro Pusat Statistik data penyebaran penduduk serta angkatan kerja Indonesia pada tahun 1991 diperoleh 89,9 % penduduk Indonesia berada di pedesaan dan prosentase angkatan kerja pada sektor industri adalah 60 %, sedangkan 17,75 % di sektor lain. Data tersebut di atas nampak bahwa sektor perdagangan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang merupakan program pemerintah Orde Baru, telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta roda perekonomian yang semakin dirasakan manfaatnya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu sasaran pembangunan jangka panjang negara Indonesia adalah tercapainya perekonomian yang serasi dan seimbang, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Dengan demikian produksi yang dihasilkan oleh produsen semakin meningkat, sementara permintaan terhadap barang juga meningkat dari konsumen akibat karena kenaikan

dari pendapatan masyarakat. Kedua hal tersebut disamping produksi dari produsen semakin meningkat, sedang minat dari konsumen untuk memiliki suatu barang juga semakin meningkat, hal mana akan menarik seseorang untuk melaksanakan perdagangan dan juga ekonomi mereka semakin mendasak, serta semakin membaiknya sarana yang dapat mengangkut barang-barang dari suatu tempat sampai ke tujuan dan membaik sarana pasar sebagai tempat beroperasi.

Di sinilah pihak yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur, kesempatan ini untuk mengambil alih barang-barang dari produsen untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen, yang biasanya lazim disebut sebagai pedagang pengecer atau pedagang kaki lima sementara itu terdapat pula kejadian-kejadian sosial ekonomi lainnya yaitu dengan semakin meningkatnya golongan umur 10 - 20 yang sebenarnya masih golongan umur sekolah, tetapi karena faktor ekonominya rendah maka memaksa untuk mencari pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang di atas oleh penulis merasa perlu untuk meneliti sejauh mana pedagang kaki lima yang ada di Bone dalam menyerap tenaga kerja, serta keberadaan pedagang kaki lima tersebut semakin hari jumlahnya bertambah, di mana hal ini oleh penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM MENUNJANG KESEMPATAN KERJA DI DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BONE.

Untuk lebih jelasnya mengenai tenaga kerja pada

sektor formal dan informal dalam menunjang kesempatan kerja di kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1.

JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR INFORMAL DAN FORMAL
DI KABUPATEN BONE TAHUN 1987 - 1991

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	Sektor Formal/ Informal	Pengangguran
1987	179.982	96.053	83.929
1988	193.178	108.053	85.125
1989	186.962	114.469	72.493
1990	194.538	118.791	75.747
1991	227.032	112.757	114.275

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Dengan melihat tabel di atas tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh lapangan kerja adalah pada tahun 1987 yaitu 83.929 orang, pada tahun 1988 sebesar 85.125 orang pada tahun 1989 hanya sebesar 72.493 orang, dan pada tahun 1990 sebesar 75.747 orang serta pada tahun 1991 sebesar 114.275 orang.

1.2. Masalah Pokok

Untuk memperoleh penjelasan-penjelasan tentang rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah bagaimana cara mengembangkan sektor informal di kabupaten bone dalam menyerap tenaga kerja dengan melihat masalah

yang ada antara lain :

1. Sejahtera mana tenaga kerja yang ada, dapat diserap oleh pedagang kaki lima.
2. Apakah dengan demikian bertambahnya golongan tenaga kerja yang menganggur sedang ekonomi keluarga mereka semakin mendesak, akan memaksa mereka untuk bekerja.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan penulisan

- a. Untuk melihat secara langsung tingkat pendapatan dan tingkat perkembangan dari pedagang kaki lima
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat atau mendorong para pedagang kaki lima dalam usahanya.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan dalam perbandingan bila mana layak dari pembaca utamanya yang berjiwa dagang.
- b. Dari hasil analisa tingkat perkembangan pedagang kaki lima dan konsumen dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja maka pemerintah sebagai yang berwenang untuk mencari jalan bagaimana mendorong mereka dalam meningkatkan usahanya.

1.4. H i p o t e s i s

Adapun mengenai hipotesis yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Diduga, bahwa sebagian besar tenaga kerja yang ada di kabupaten Bone dapat diserap oleh pedagang kaki lima.
- b. Diduga pula, bahwa sektor informal senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

1.5. Tata Urut Bahasan

Agar materi penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti dengan jelas, maka penulis membagi ke dalam komposisi bab sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan berisi tentang Latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis serta tata urut bahasan.
- Bab II. Kerangka teori, dalam bab ini berisi teori yang mendukung analisa yang membahas mengenai tinjauan tentang konsep-konsep sektor informal dan masalah kesempatan kerja serta pengangguran.
- Bab III. Menguraikan tentang metodologi penelitian terdiri dari, daerah penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis serta konsep operasional.
- Bab IV. Merupakan bab yang berisikan mengenai hasil pembahasan dan hasil penelitian.
- Bab V. Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran serta daftar pustaka.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Masalah dan Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan beberapa pakar sarjana-sarjana ekonomi serta ilmuan sosiolog dalam teorinya menyatakan bahwa kuantitas tenaga kerja yang sangat tinggi untuk kondisi negara Indonesia pada masa yang lalu dan perkiraan untuk masa depan merupakan salah satu faktor atau variabel ekonomi yang turut menentukan cepat lambatnya laju pertumbuhan ekonomi baik dilihat dari segi kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan perkapita.

Oleh karena itu betapa perluasan kesempatan kerja seharusnya merupakan suatu sasaran pokok dalam rangka kebijaksanaan pembangunan. Usaha untuk memperluas serta menciptakan lapangan pekerjaan haruslah ditujukan kepada pengunaan angkatan kerja secara produktif, dengan jalan memperluas dasar aktifitas-aktifitas ekonomi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dibanding kegiatan yang baru maupun dibanding tradisional.

Menurut Swasono Yudo berpendapat sebagai berikut :

"Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk membangun ekonomi secara keseluruhan, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi baik yang mengalami penukaran produk maupun melalui penukaran perkapita, selain itu kesempatan kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Demikianlah maka tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses

produksi dan juga distribusi barang dan jasa". 1)

Pada konsep di atas beliau kelihatannya tidak memperhatikan adanya probabilitanya kelimpahan tenaga kerja yang mungkin saja terjadi, hal lain bahwa konsep tersebut juga tidak memperhitungkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja yang ada.

Dewasa ini, dengan adanya kelesuhan ekonomi dunia yang berkepanjangan, tanpa adanya jalan keluar yang akurat sangat berpengaruh dengan faktor-faktor produksi yang ada. Adanya kelesuhan ekonomi dunia yang berkepanjangan ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya modal, hingga secara langsung juga berpengaruh terhadap menurunnya investasi di pihak lain. Itu berarti bahwa produktifitas juga menurun. Dengan adanya kelesuhan ekonomi juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap penggunaan tenaga kerja yang ada, yang berarti bahwa perbandingan tenaga kerja sempat terse-rap sektor perekonomian yang sifatnya formal dengan perbandingan angkatan kerja yang sangat pincang, dan hal lain berlaku secara global, baik terhadap negara-negara industri. Realitas kita bisa lihat di negara Indonesia, yang terpandang jelas berbagai angkatan kerja di sana sini terdapat pengangguran.

1). Swasono Yudo, 1983, Metode Perencanaan Kerja, Penerbit BPFE. Yogyakarta. hal 20.

2.2. Masalah Tenaga Kerja

Pola pembangunan yang sementara digalakkan oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru sekarang ini, melalui tahapan-tahapan Repelita, dimaksudkan untuk mampu mencapai sasaran utamanya yaitu dengan optimalisasi seluruh faktor ekonomi yang sekali gus berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada gilirannya diperhadapkan kepada berbagai problematika dan dilematika serta berbagai macam dan bentuk hambatannya.

Besarnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru secara kasar dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Dengan mengingat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja hampir konstan, hal ini terutama karena besarnya jumlah penduduk.

Berdasarkan anggapan di atas maka selama dasawarsa mendatang, kita bisa menduga tetap tingginya pertumbuhan angkatan kerja, sangat mungkin pada tahun 2000 angkatan kerja akan menjadi 2 (dua) kali lipat dibanding angkatan kerja tahun 1987, akan mulai memberikan dampak terhadap jumlah orang yang hendak masuk angkatan kerja setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa tekanan suplai tenaga kerja terhadap penciptaan lapangan kerja akan terus menjadi masalah.

Dalam mewujudkan suatu Repelita, pemerintah dalam rangka proses pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka tentunya berusaha menitik beratkan

perhatiannya pada sektor pertanian untuk mendukung sektor industri, khususnya industri yang padat karya. Namun oleh faktor-faktor keterbatasan sehingga usaha pemerintah dalam pendistribusian lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja yang semakin melimpah agaknya sangat sulit, hal lain cukup berpengaruh dalam pemanfaatan tenaga kerja yang ada, karena faktor rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengetahuan bagi sebagian besar angkatan kerja yang tersedia.

Masalah angkatan kerja sangat erat hubungannya dengan masalah pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah disatu pihak dan pertambahan penduduk dipihak lain. Menurut kantor Statistik pada tahun 1985 jumlah tenaga kerja Indonesia berjumlah 52,5 juta jiwa, di mana terdapat pengangguran sekitar 35 %. Ini berarti bahwa sepertiga dari angkatan kerja berada dalam keadaan setengah penganggur.

Oleh Sutopo Juwono, sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja Indonesia mengemukakan keresahan di kota besar sebagai berikut :

"Keresahan sosial pada kota besar perlu dilihat dari sudut pandangan nilai masyarakat yang telah dirobah, tentunya keadilan dan pemerataan kini sudah menjadi milik manusia, keresahan dikalangan anak mudah akibat persaingan mencari pekerjaan pada, Pada pelita ini sangat mengkwatirkan. Tetapi peranan sektor informal dalam menyelamatkan soal ketenaga kerjaan merupakan kenyataan mendapatkan acungan jempol" 2)

2). Sutopo Juwono, 1985, Masyarakat Pinggiran, Prisma No 3. Penerbit LP3ES. Jakarta. hal 36.

Dari kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga kerja pengangguran memperlihatkan kecenderungan untuk berurbanisasi ke kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena anggapan mereka bahwa di kota tersebut nantinya pola kehidupan mereka akan berubah, dan akibatnya dari urbanisasi besar-besaran tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang bukan saja segi ekonomi tetapi akan mengarah kepada keresahan sosial karena adanya pengangguran. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % setahun ini, hal tersebut tentunya tidak akan mampu mengimbangi tenaga kerja yang tersedia. Mereka kurang memperhitungkan bahwa di kota-kota besar jauh lebih sulit untuk masuk sektor perekonomian yang formal di banding dengan daerah pedesaan. Untung saja bahwa sektor informal oleh Sutopo Juwono menyebutkannya sebagai sang penyelamat di mana dapat menampung tenaga kerja yang tidak sempa ter-serap oleh sektor formal.

2.3. Pengertian Tenaga Kerja

Yang dimaksud tenaga kerja adalah semua penduduk yang telah mencapai usia kerja, biasanya umur dalam usia kerja adalah 15 - 64 tahun, namun kenyataan di Indonesia, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Menurut Undang-undang pokok ketenaga kerjaan No. 14 tahun 1969, setiap orang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

termasuk tenaga kerja. Dalam hal ini tidak membatasi pada umur seperti yang tercatat dalam sensus tahun 1980.

Menurut Dr. M. M. Papayungan mendefenisikan tenaga kerja sebagai berikut :

"Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi suatu barang dan jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut". 3)

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Ketenaga Kerjaan, sensus dan defenisi yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menarik suatu kesimpulan bahwa tenaga kerja untuk kondisi perekonomian Indonesia adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas dapat melakukan dan serta menambah produksi suatu barang dan jasa manakalah ada permintaan terhadap mereka dan manakala ingin berpartisipasi serta memberikan kontribusinya pada aktifitas tersebut. Sebagai mana diketahui bahwa tenaga kerja (manpower) dibagi dua bagian yaitu : (1) Angkatan Kerja, (2) Bukan angkatan kerja.

1. Pengertian Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan suatu komposisi yang termasuk bagian dari tenaga kerja, secara demografis besar dari angkatan kerja tersebut, hal ini dapat di ukur dengan menggunakan atau menghitung prosentase tenaga kerja dari angkatan kerja.

3). M.M. Papayungan, 1984, Diktat Sumber Daya Manusia Jilid I, Ujung Pandang. hal 15.

Analisa yang mendalam mengenai perubahan dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang sangat besar manfaatnya dalam rangka memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Dollar Bukit dan Zainab Bakir dalam tulisannya berjudul "Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia", setelah mengalami pengaruh pertumbuhan penduduk dan beberapa faktor sosial demografis yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan daerah tempat tinggal (kota/desa) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Oleh Swasono Yudo, telah memberikan batasan sebagai berikut :

"Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja) baik yang bekerja maupun mencari pekerjaan yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan". 4)

Sedangkan oleh Dr. M.M. Papayungan mendefenisikan angkatan kerja sebagai berikut :

"Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlihat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa". 5)

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi pada wilayah perkotaan, pertumbuhan angkatan kerja di kota yang tercatat selama ini adalah 2 - 3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan di pedesaan, ini karena adanya perubahan defehisi tentang batas-batas perkotaan dari

4). Swasono Yudo, 1983, Metode Perencanaan Kerja, Penerbit BPPE, Yogyakarta. hal 20.

5). M.M. Papayungan, 1984, Diktat Sumber Daya Manusia Jilid I, Ujung Pandang. hal 23.

beberapa kota besar di Indonesia misalnya Ujung Pandang dan Medan, akan pengamatan sepintas selalu mendukung hasil-hasil sensus, jelas sebagian besar pekerjaan-pekerjaan baru telah tercipta di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Perkotaan di mana banyaknya investasi barulah disalurkan lebih dari pada itu, dua kelompok utama pekerjaan di kota laju penduduk pedesaan yang sirkuler, tidak dapat dilacak dalam sensus. Cenderung "Underestimate" jumlah pekerjaan baru di kota terutama di Jawa. Masalah-masalah lingkungan dan beban lainnya yang penting tercipta karena "Urbanisasi berlebihan merupakan dua isu penting untuk kebijaksanaan dan penelitian. Walaupun demikian akan tampak jelas bahwa pemecahan terletak pada usaha yang lebih serius untuk mendesentralisasikan investasi dari pada usaha untuk mengendalikan arus tenaga kerja (kebijakan untuk membatasi) wilayah operasi pedagang kaki lima yang mengisi kesempatan-kesempatan baru di kota

2. Pengertian Bukan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja yang bukan angkatan kerja adalah juga merupakan bagian dari tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara mencari pekerjaan, tetapi terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain seperti ; sekolah, di rumah sakit dan sebagainya.

Jadi mereka termasuk klasifikasi tenaga kerja bagi yang belum yang mendapatkan pekerjaan atau bagian dari

tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat dalam suatu kegiatan produksi untuk memproduksi barang dan jasa.

2.4. Pengangguran

Pengangguran adalah semua penduduk yang berada dalam kelompok usia kerja tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja atau golongan usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Oleh Paul Bairoch memebrikan suatu defenisi sebagai berikut ; "Pengangguran adalah seseorang yang telah mencapai usia kerja tertentu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan agar memperoleh upah dan keuntungan kerja" 6)

Bagian akhir dari defenisi ini sering mendapat kritik karena sebagian pengangguran memang siap untuk bekerja namun tidak mencari pekerjaan. Sikap tidak mencari pekerjaan tidak harus memandang rendahnya keinginan untuk bekerja, tetapi kadang-kadang mencerminkan perasaan bahwa tidak ada gunanya mencari pekerjaan. Bila mereka yang siap juga dihitung sebagai pengangguran, akan naik cukup tajam. Sifat penting yang lain adalah adanya perbedaan defenisi yang digunakan untuk negara yang sedang berkembang menetapkan jumlah penduduk 2000 atau 5000 jiwa sebagai batas terendah jumlah penduduk kota, batas yang jauh lebih rendah dari pada yang ditunjukkan, baik inflisik dan juga

6). Chris Manning, Tajuddin Nur Effendi, 1985, Urbanisasi pengangguran Sektor Informal, PT Gramedia Jakarta. hal 61.



eksplisit, dalam pembicaraan tentang masalah pengangguran di kota. Dalam struktur negara kita, sama seperti kebanyakan negara-negara berkembang, sebagian besar jumlah penduduk mata pencahariannya kebanyakan pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan serta sektor ekstraktif (pertambangan). Dalam tingkat pertama penduduk dan angkatan kerja menimbulkan kesulitan pada sektor pertanian oleh karena pada umumnya petani-petani terlibat dalam sektor pertanian masih terikat pada pola tanaman yang tradisional sifatnya juga bahwa modal mereka dalam pengelolaan lahan sangat minim, dan pada lain pihak bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam pertanian tidak produktif, sehingga pada sektor ini memperlihatkan suatu gambaran yang konkrit mengenai pengangguran terselubung, yang selanjutnya membawa akibat yang lebih luas pada sektor-sektor lainnya. Pertambahan penduduk mengakibatkan persediaan tanah garapan semakin menyempit dan terpencar-pencar.

Pengertian angkatan kerja dapat dilihat sebagai berikut :

"Angkatan kerja yang bertambah pada sektor yang bersangkutan (pertanian) menimbulkan gejala pengangguran yang tidak kentara (terselubung) di daerah pedesaan". 7)

7). Sumitro Djoyohadikusumo, 1985, Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini, Penerbit LP3ES, Jakarta hal. 3.

Oleh karena lapangan kerja baru di daerah pedesaan menjadi terbatas, maka sebagian angkatan kerja mengalir ke lingkungan kota-kota, yang menimbulkan urbanisasi.

Lyn Squire mengatakan bahwa ; meskipun terdapat tantangan yang amat besar karena tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang lebih dua kali lipat dari pada yang dialami oleh negara-negara maju pada waktu membangun industri pada abad yang lalu, data kesempatan kerja Indonesia menunjukkan tidak adanya alasan kwatir. Pertumbuhan angkatan kerja dan pengangguran yang terbuka nampak telah menurun. Pengangguran terbuka menurun menurut standar Indonesia selama 1980-an, sedang hasil sensus menunjukkan bahwa ia telah menurun lagi pada tahun 1990 terutama pada daerah perkotaan. Apabila kita terima angka resmi tersebut, dapat diajukan pertanyaan, berapa banyak orang (pemerintah) kwatir mengenai prospek kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru itu sendiri bukan sasaran kebijakan, walaupun demikian sebelum membicarakan hal-hal tersebut secara ringkas kita perlu meninjau kelompok pengangguran terbuka yang relatif dan kelompok setengah pengangguran yang jauh lebih besar. Banyak kritik yang dilontarkan pada usaha untuk menggambarkan ketidak seimbangan pasar tenaga kerja di negara agraris dan miskin melalui pendekatan angkatan kerja terhadap masalah pengangguran. Kritik utama tampak berlaku negara Indonesia. Orang-orang miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah akan menjadi pengangguran dan

banyak terpaksa cari nafkah melalui usaha sendiri dengan modal kecil, atau tanpa modal sama sekali. Lebih dari itu bahkan wilayah perkotaan, seluruh resmi mencari pekerjaan sangat terbatas dan usaha pemerintah ke arah tersebut dengan dikeluarkannya "kartu Kuning" akan tetap memenuhi kesulitan selama mencari kerja pada sektor formal.

2.4. Sektor Informal

Istilah "sektor informal" biasanya digunakan untuk sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal dalam tulisan ini terutama dianggap suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu memasuki kegiatan yang berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari pekerjaan dan pendapatan, dari pada memperoleh keuntungan, karena yang terlibat dalam sektor ini umumnya miskin pendidikan, sangat rendah dan tidak terampil serta kebanyakan para migran. Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis pengusaha yang dikenal yang dikenal pada umumnya.

Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan pendapatan ini yang langsung dari diri sendiri.

dan bagaimana juga diakui bahwa banyak diantara mereka berusaha dan bahkan ada yang berhasil mengatasi hambatan yang ada dan secara perlahan-lahan masuk ke dalam perusahaan yang berskala kecil dengan modal keterampilan yang memadai

dengan berorientasinya pada memperoleh keuntungan.

Dengan kata lain, sektor informal pada daerah perkotaan harus di pandang sebagai unit-unit berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengelolaan (managerial) yang besar. Dasar pemikiran untuk mengadakan perbedaan yang demikian ini tidak perlu dipersoalkan lagi dari signifikansi operasional dan kebijaksanaannya, misalnya asumsi umum tentang program pengembangan perusahaan kecil pada umumnya sah bagi pengembangan perusahaan kecil sektor informal, kebijaksanaan untuk pengembangan sektor ini harus melebihi program pengembangan perusahaan kecil dan mengidentifikasi serta memperbaiki faktor-faktor yang menyangkut evolusinya, termasuk lingkungan sektor informal.

1. Timbulnya Sektor Informal

Tatanam masyarakat yang di dasarkan pada pertanian ilmu-ilmu sosial pada umumnya dikenal sebagai sistim petani. Ini tidak hanya mengandung pengertian suatu tipe masyarakat tertentu, tetapi juga menyangkut hakikat.

Masalah pembangunan, sejumlah besar bahan bacaan itu memang banyak memberikan perhatian pada pedesaan dan produksi pertanian. Sekalipun demikian sejumlah besar penduduk negara (secara optimis) disebut sebagai negara sedang berkembang tinggal di kota-kota. Proporsi penduduk yang tinggal di kota-kota berbeda pada satu dan lain negara, tetapi untuk keseluruhan dunia ketiga proporsi sekitar 25%

Di wilayah pedesaan, sebagian besar penduduk bekerja di dalam bidang pertanian. Demikian pula kehidupan di kota biasanya dipandang berkaitan dengan gaya kehidupan industrialisasi. Tetapi anggapan semacam ini sama sekali tidak memperlihatkan kenyataan. Hanya separuh penduduk kota dan bahkan kurang dari itu yang memperoleh pekerjaan di pabrik dan pada perusahaan lainnya yang termasuk sektor formal. Tak seorang yang mengenal suasana sosial ekonomi kota di dunia ketiga terperanjak dengan fakta ini.

Tetapi untuk jangka waktu lama hanya sedikit saja perhatian yang diberikan pada kegiatan ekonomi dan pendapatan yang digunakan oleh sebagian penduduk di kota untuk melangsungkan kehidupannya. Kelalaian ini berlanjut terus sampai pada munculnya konsep sektor Informal beberapa tahun yang lalu. Sejak itu konsep tersebut menjadi populer istilah tersebut pertama-tama diungkapkan oleh Hart (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir, mulai saat ini sektor informal telah disebut suatu konsep yang memberikan harapan dan disempurnakan oleh suatu badan pekerja ILO (International Labour Organisation) yang mempelajari kesempatan kerja di Kenya dalam rangka program kesempatan kerja dunia.

Salah satu tujuan dari karangan ini adalah untuk menganalisa kegunaan konsep tersebut. Sebagian besar pembicara tentang sektor informal berangkat dari sifat mendua

yang dipandang bersumber pada perekonomian kota negara dunia ketiga yang non sosialis. Sektor informal digunakan dalam pengertian pekerja bergaji status buruh harian dalam pekerjaan yang permanen, seperti pekerjaan dalam industri kantor pemerintah dan perusahaan besar lainnya.

- a. Sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan, yang merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang saling berhubungan dan amat terorganisir
- b. Pekerjaan yang secara resmi dalam perekonomian
- c. Syarat-syarat bekerja yang dilindungi hukum.

Karena itu, beberapa ilmuwan ekonomi berbicara tentang sektor yang terorganisir, terdaftar dan dilindungi oleh hukum. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria ini kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informal, suatu istilah yang mencakup pengertian pelbagai kegiatan yang sering sekali tercakup dalam istilah umum "usaha sendiri".

Berdasarkan yang sejalan dengan program pemerintah, timbullah berbagai bidang usaha yang sifatnya wiraswasta, baik yang bersifat formal maupun yang sifatnya informal. Namun pada kesempatan ini penulis ingin dan menitik beratkan perhatian pada sektor informal yang sering dilambangkan dengan sektor "S" dalam buku Chris Manning di luar sekian banyak sektor formal yang ada, sebagai pembahasan dalam penulisan skripsi ini, sektor yang satu ini diharapkan menjadi alternatif sebagai "Way Out" dalam membantu

pemerintah menyelamatkan negara dari kemelut perekonomian khususnya mengenai pengangguran seperti yang diungkapkan oleh menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Cosmas Batu Bara bahwa ; "Sektor informal merupakan tumpuan harapan untuk mengatasi pengangguran yang semakin hari semakin melimpah di Indonesia dan beliau dipercayakan oleh PBB sebagai presiden ILO se dunia.

Berdasarkan kutipan di atas kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa sektor informal seharusnya mendapat perhatian khusus tentang prospek pengembangannya dalam menanggulangi pengangguran yang merupakan lingkaran setan yang tidak dipecahkan permasalahan selama bertahun-tahun.

Kemudian oleh Aris Anata dan Prijono mengatakan sesuai prisma No. 3.

"Kemandirian sektor informal sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena pertumbuhan sektor informal secara langsung memperbaiki kesejahteraan ekonomi lemah, maka kemajuan sektor ini sekaligus menaikkan pendapatan nasional dan memperbaiki distribusi pendapatan". 8)

Berselang beberapa tahun terakhir ini posisi dan peranan sektor informal semakin dipahami dan dihargai sebagai sektor perekonomian yang dianggap sebagai penyelamat. Kegagalan sektor formal, misalnya industri moderen, untuk menyerap tenaga kerja mengangkat tinggi sektor informal yang selama ini dianggap sebagai sektor sampingan (marginal). Lebih-lebih sejumlah ahli dan peneliti memusatkan perhatian serta sekaligus mengungkapkan tentang betapa

8). Prisma No.3. 1985 Sektor Informal, hal 19.

besarnya kontribusi sektor ini terhadap penyerapan tenaga kerja.

Praduga yang diberikan tentang gambaran berlebihan, yang kurang menyenangkan kehidupan kelompok lapisan bawah yang cukup besar pada perekonomian kota, sebagian yang dikarenakan proses stagnasi atau involusi yang merupakan sebab pokok pesatnya pertumbuhan sektor informal.

Akan tetapi pemikiran bahwa di sektor ini merupakan sumber bagi pemalas dan pekerja yang tidak produktif, sumber isolasi, pemikiran yang mengutarakan sektor informal sebagai penampung "sisa" penduduk kota tidaklah cukup menggambarkan kenyataan.

Berlawanan dengan penilaian yang negatif, karangan-karangan yang baru menunjang bahwa kegiatan-kegiatan dalam sektor informal bisa sangat efisien dan menguntungkan, dengan demikian tekanannya lebih banyak pada lingkungan tempat kerja dari pada prestasi nyata bekerja tersebut, ini merupakan penjelasan kuantitatif dualisme di kota yang menekankan sistim produksi.

2. Pengertian Sektor Informal

Konsep tentang sektor informal sampai sekarang ini rupanya masih mengalami nasib yang belum menguntungkan karena belum adanya defenisi yang tepat tentang apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud sektor informal. Para ahli baik yang berasal dari disiplin ilmu ekonomi maupun

yang berkecimpung atau yang menyangang predikat sosiolog sampai sekarang ini belum mencapai konsensus tentang tepatnya defenisi yang diberikan terhadap apa yang disebut sektor informal.

Namun beranjak keterbatasan tersebut dari beberapa ahli mencoba mengemukakan atau mendefenisikan yaitu :

"Pada umumnya sektor informal di Indonesia itu tidak mempunyai hubungan formal dengan pemerintah atau sistim perbankan, pada umumnya sektor informal tidak berorientasi pada pembangunan atau penggunaan bahan atau alat tehnologi impor dan skala persamaan". 9)

Kemudian ahli seorang peneliti, Squire memberikan batasan terhadap sektor informal yaitu :

"Mereka yang bekerja sendiri ataupun usaha-usaha yang mempunyai pekerjaan kurang dari lima orang, dikatakan bahwa peraturan upah minimum dan faktor-faktor institusional kurang berpengaruh terhadap penghasilan pekerja itu karena suplay tenaga kerja biasanya dalam keadaan yang berlebihan menyebabkan penghasilan tetap rendah". 10)

Dikatakan bahwa krateris ik yang membedakan sektor formal dan sektor informal yang berkesinambungan dalam pasar tenaga kerja di negara sedang berkembang. Oleh karena itu dianggap bahwa pembagian dua sektor ini tak dapat dibenarkan. Ada beberapa alasan untuk menolak hal-hal ini sebagai berikut :

-
- 9). Hidayat, 1984, Angkatan Kerja di Indonesia. Pusat Penelitian UGM, Jakarta, hal 28.
 - 10). Squire, Zainab, Chris Manning, Angkatan Kerja di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta. hal 120.

- a. Apakah ciri-ciri pokok mencerminkan suatu rangkaian atau tidak, hal ini dapat diketahui dengan melalui suatu penelitian tersebut. Namun berdasarkan pengetahuan umum terhadap kegiatan-kegiatan sehari-hari di kota, pandangan bahwa sektor formal dalam beberapa hal sangat terpisah dari kegiatan lainnya dari pasar perkotaan.
- b. Apabila kesempatan kerja berbeda dalam ke dua sektor itu lebih merupakan perbedaan tingkat, dari pada perbedaan jenis, maka sepanjang perbedaan tingkat pasar diterapkan metode ilmu ekonomi melalui penggunaan model-model yang dianggap bahwa pasar tenaga kerja di bagi atas dua sektor yang berbeda.

Perbedaan utama antara kedua sektor berkisar pada ide bahwa kesempatan kerja pada sektor formal dalam beberapa hal segalanya dilindungi. Hal ini mengakibatkan upah dan kondisi kerja sektor ini, pada umumnya tidak tersedia bagi pencari kerja di dalam pasar tenaga kerja, kecuali kalau mereka dapat mengatasi hambatan untuk masuk ke dalam sektor ini. "Perlindungan semacam ini bisa dilakukan oleh organisasi buruh, pemerintah atau keduanya. Contoh praktek semacam ini banyak dijumpai pada negara-negara yang sedang berkembang".

Salah satu aspek penting lainnya yang perlu dilihat dari perbedaan antara "sektor formal dan sektor informal" adalah bahwa kesempatan kerja dalam sektor informal sering

dipengaruhi jam kerja yang tidak tetatp dalam suatu jangka waktu tertentu (misalnya seminggu). Hal ini disebabkan oleh ; a) tidak ada hubungan kontrak kerja jangka panjang dalam sektor ini, upah dalam sektor ini cenderung dapat dihitung perhari atau per jam. b) menonjolkan usaha kegiatan usaha sendiri. Oleh karena itu penting untuk membedakan antara tingkat upah (perjam atau per hari) dalam menghasilkan rata-rata seminggu atau perbulan.

3. Sektor Informal dengan Ciri-cirinya

Untuk membantu kita lebih mengetahui dan lebih mendalami sektor ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa pendapat para ahli selama ini menekuni sektor tersebut, misalnya; Soetjipto Wiriosarjono mengemukakan :

- "a. Pola kegiatannya tidak teratur baik dari segi waktu maupun segi permodalan dan penerimaan.
- b. Tidak tersentu oleh peraturan dan ketentuan yang ditetatkan oleh pemerintah.
- c. Modal, peralatan atau obsetnya biasanya kecil dan atas dasar perhitungan harian.
- d. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
- e. Tidak mempunyai keterkaitan dengan perusahaan lain.
- f. Umumnya berasal dari perekonomian lemah" 11)

Ciri utama sektor informal adalah tidak adanya bantuan pemerintah, misalnya adanya proteksi ekonomi, dan juga berpariasinya jam kerja, perputaran pekerjaan juga

11). Soetjipto Wirosarjono, 1985, Pengertian Sektor Informal, Prisma No 3. hal 5.



tinggi. Terjunnya ke sektor informal amat mudah karena usaha pada sektor ini tidak menuntut modal yang besar, demikian pula tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, dapat menggunakan bahan-bahan setempat, relatif tidak terpengaruh dengan gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan sektor informal secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi lemah, yang sekaligus menaikkan pendapatan nasional dan memperbaiki distribusi pendapatan.

4. Peranan Sektor Informal dalam Menyerap Tenaga Kerja Sebagai Indikator

Besarnya sektor informal dalam tulisan ini akan dilihat jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai porsi untuk sektor informal. Penentuan indikator sektor informal sangat tergantung pada definisi dan data yang tersedia. Perubahan-perubahan definisi dan konsep, ataupun tidak konsisten dengan penggolongan status kerja dalam sensus dan survey menimbulkan kelemahan kelemahan terutama untuk melihat trend atau melakukan perbandingan.

Misalnya penggolongan status kerja pada tahun 1980, status kerja dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu,

- a) Pengusaha tanpa buruh
- b) Pengusaha dengan buruh
- c) Buruh dan pekerja.

Dan setelah itu sensus berikutnya dibagi menjadi, berusaha sendiri tanpa orang lain, berusaha dibantu dengan anggota rumah tangga, buruh tak tetap, buruh dan pekerja rumah tangga, akibatnya seperti yang telah dikemukakan bahwa proporsi yang digunakan sektor informal.

Sektor informal pada dasarnya mempunyai dampak positif dan mereka berusaha dalam membentuk wiraswasta tanpa subsidi atau pemerintah memberikan bantuan. Jadi sebenarnya sektor ini membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran, dan tentunya kita semua akan sependapat sektor ini membantu dalam menyerap tenaga kerja dan apabila pada kesempatan ini penulis mengajak bersepakat apabila sektor tersebut dibiarkan berkembang tentunya berusaha untuk diarahkan sebaik mungkin sehingga hal-hal yang sifatnya mengacau dapat teratasi melalui sektor informal, misalnya kehadiran becak, menurut penulis seharusnya alat transportasi tersebut masih dapat teratasi dan juga bahwa para pengayuh becak yang demikian banyak, akan dikemanakan apabila sumber mata pencahariannya dihapuskan.

Dalam menangani sektor informal ini kita sering melakukan jalan pintas untuk merubah wajah sektor informal menjadi sektor formal dengan adanya kebijakan-kebijakan untuk melokasir pada suatu tempat tertentu, seperti pembangunan pasar-pasar Inpres di mana pemerintah beranggapan bahwa timbulnya sektor informal karena tidak adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Menurut penulis, pedagang

atau pekerja yang terlibat dalam sektor ini dibiarkan berkembang sedemikian rupa, sehingga suatu kelas akan berubah wajahnya sendiri untuk melangka ke sektor formal.

5. Klasifikasi Sektor Informal

Tidak berbeda dengan sektor formal, sektor informal pun dapat diklasifikasikan atau dibagi berdasarkan aktifitas-aktifitas dalam perekonomian misalnya, pada majalah Prisma No. 6, sektor informal dibagi menjadi :

- Sektor dagang
- Sektor jasa
- Sektor industri pengelolah
- Sektor angkutan
- Sektor bangunan 12)

Sedangkan Diah Widarti pada bukunya mengklasifikasikan sektor informal sebagai berikut :

- Sektor perdagangan
- Sektor transpor
- Sektor keuangan
- Sektor Jasa 13)

Melihat klasifikasi di atas keduanya memperlihatkan kesamaan namun, dari pembanginan di atas penulis lebih mengfokuskan diri dalam mebahas sub sektor perdagangan khususnya pedagang kaki lima.

-
- 12). Kartini Syarir, 1985, Klasifikasi dan Jenis-jenis Sektor Informal, Prisma No. 6. hal 79
 13). Diah Widarti, 1984, Angkatan Kerja di Indonesia CV. Rajawali, Jakarta. hal 121.

2.6. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (street trading) adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan di kota-kota di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin. Meskipun penting, pedagang kaki lima hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik di banding dengan pekerjaan kelompok utama yang lain. Pedagang kaki lima terletak pada penelitian yang tidak sukar didefinisikan secara tepat. Dewasa ini, yang menonjol menyangkut masalah ini tentang pedagang kaki lima di berbagai kota di Indonesia oleh para pejabat kota pada umumnya masih saja ditinjau dari kebijakan menata lingkungan kota, seperti sektor informal pada umumnya, masalah meliputi polusi kota, penghambat lalu lintas kota dan dampak keindahan kota.

Namun karena alternatif untuk meningkatkan pekerja-
tersebut tidak ada sehingga bagaimanapun, bentuk perdag-
angan seperti ini tidak akan pernah teratasi. Mengapa sampai
demikian, jawabannya adalah bahwa alternatif untuk mengubah
atau mengganti pekerjaan ini bagi para pekerja terlanjur
berkecimpung pada pedagang kaki lima sangat kecil kemung-
kinannya, sehingga apapun hambataannya baik hambatan yang
sifatnya formal maupun hambatan struktural, pekerjaan ter-
sebut akan tetap menghisap Lembaran hidup perkotaan. Sama
halnya berita yang dimuat dalam sinar Harapan tertanggal

2 Agustus 1985 hal 1, tentang masalah penampungan kaki lima
di Jalan Panglima Polim, menimbulkan polusi lingkungan yang

14). Yan Pieter Karafir, 1977, Pemupukan Modal Ped-
gang Kaki Lima, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Univer-
sitas Indonesia, Jakarta, hal 3.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka
kemudian diadakan survey di Jakarta dan Di Bandung pada
tahun 1973. Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa
pedagang kaki lima merupakan enceran yang bermodal kecil,
sehingga tidak mampu memiliki tempat yang tepat seperti
kios dan juga berpendapatan rendah sesuai tarap hidup me-
reka sangat rendah. Pada survey itu, juga didapatkan bahwa

"Betapa kurangnya data yang tersedia mengenai
pedagang kaki lima, sehingga pola kehidupan
mereka tidak bisa atau kurang dapat memahami
secara mendalam, mungkin faktor inilah yang
menyebabkan kebijaksanaan-kebijaksanaan peme-
rintah untuk mengatasi pedagang kaki lima di
berbagai kota di Asia Tenggara pada umumnya
kurang berhasil". 14)

Sebagai berikut :
Kil Indonesia, dengan rumusan sebagai berikut :
"Betapa kurangnya data yang tersedia mengenai
pedagang kaki lima, sehingga pola kehidupan
mereka tidak bisa atau kurang dapat memahami
secara mendalam, mungkin faktor inilah yang
menyebabkan kebijaksanaan-kebijaksanaan peme-
rintah untuk mengatasi pedagang kaki lima di
berbagai kota di Asia Tenggara pada umumnya
kurang berhasil". 14)

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka
kemudian diadakan survey di Jakarta dan Di Bandung pada
tahun 1973. Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa
pedagang kaki lima merupakan enceran yang bermodal kecil,
sehingga tidak mampu memiliki tempat yang tepat seperti
kios dan juga berpendapatan rendah sesuai tarap hidup me-
reka sangat rendah. Pada survey itu, juga didapatkan bahwa

Sebagai berikut :

Kil Indonesia, dengan rumusan sebagai berikut :

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka
kemudian diadakan survey di Jakarta dan Di Bandung pada
tahun 1973. Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa
pedagang kaki lima merupakan enceran yang bermodal kecil,
sehingga tidak mampu memiliki tempat yang tepat seperti
kios dan juga berpendapatan rendah sesuai tarap hidup me-
reka sangat rendah. Pada survey itu, juga didapatkan bahwa

masalah lingkungan fisik perkotaan yang sebenarnya merupakan masalah satu erek dari taraf hidup rendah.

Pedagang kaki lima biasanya digambarkan sebagai manifestasi pengangguran tersembunyi, atau setengah pengangguran yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier,

yang sederhana pada kota-kota dunia ke tiga. Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dipandang sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan, yang bersama dengan pengemis, pelacur dan pencuri yang tergolong dalam rakyat jelata. Atau semata-mata dianggap sebagai suatu jenis pekerjaan yang tidak relevan. Sedangkan menurut pandangan yang lebih baik, ia dipandang sebagai langkahnya kesempatan kerja yang produktif di kota. Ia dipandang sebagai suatu jawaban yang terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkal dengan migrasi desa ke kota besar pertumbuhan kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri, dan penerapan teknologi impor yang padat modal keadaan kelebihan tenaga kerja.

Dari keterbatasan tentang definisi yang tepat bagi istilah pedagang kaki lima ini, oleh Riga Adiwoso Suprpto dalam Prisma No 6, tahun 1986 halaman 85, memberikan batasan sebagai berikut :

- Tidak menetap pada suatu tempat
- Bermodal kecil
- Tidak terikat dengan pemerintah
- Tidak dikenakan pajak resmi

- Jam kerja tidak menentu

- Bersifat mengeser bagi sektor moderen

Jika dilihat maka kita dapat membayangkan bahwa pedang kaki lima dalam aktivitasnya akan menempatkan pendiriannya sebagai sektor informal yang sangat mudah dimasuki setiap orang yang menganggur. Oleh Peter Munzinger mengatakannya bahwa :

"Ciri khas yang sangat menonjol dari pedang kaki lima adalah ketidak beraturan dalam kerjanya, baik dalam masalah waktunya maupun dalam soal tempatnya hal mana akibat dari sejarah 60 % berasal dari keluarga yang berekonomi lemah" (15)

Bila kedua pendapat diatas digabungkan maka penulis untuk sementara menarik suatu konklusi bahwa pedang kaki lima adalah pedang yang tidak menetap pada suatu dimensi waktu, ruang (tempat), pola dagangannya bervariasi, terlepas dari bentuk-bentuk birokrasi yang ada, modal relatif kecil, tingkat pendidikan dan keteampilan, serta pengetahuan mereka rata-rata relatif rendah, umumnya berasal dari keluarga tak mampu dan juga rata-rata migran.

Pekerja sektor informal sub sektor pedang kaki lima yang artinya tempat orang jalan yang ada di depan toko-toko, atau sering dikenal sebagai terotol yang lebarnya sekitar lima kaki.

Pedang kaki lima sebagian dari sektor informal tentunya mempunyai peranan dan bahkan mempunyai urutan yang

15). Peter Munzinger, 1984. Pedang yang Kreatif, Penerbit Lembaga Pembangunan, Jakarta, hal 25.

teratas yaitu 60 % dari sektor-sektor lainnya dalam klasifikasi sektor informal.

Untuk menguatkan pendapat di atas kami mencoba mengutip, pendapat Dia Widarti, mengatakan bahwa :

"Sektor informal sebagian besar terdapat pe- gang yang lebih dikenal dengan nama pedagang kaki lima dimana dapat menyerap 60 % tenaga kerja informal, kemudian prosentase berikut- nya 30 % terdapat di sektor jasa, sedangkan prosentase berikutnya yaitu 10 % tersebut ber- gerat di sektor-sektor lainnya" 16)

Pendapat di atas memberikan gambaran dari pedagang

kaki lima sebagian dari sektor informal dalam memberi kon- tribusinya dalam menyerap tenaga kerja baik sektor info- mal itu sendiri maupun secara nasional. Berdasarkan pendapat Dia Widarti ini, di mana pedagang kaki lima dapat menyerap sekitar 60 %, maka untuk ini kita bisa mengetahui pedagang kaki lima yang menyerap tenaga kerja dari tahun ke tahun- semakin meningkat. Sesuai pendapat Sudomo bahwa sektor in- formal dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 50 %, serta

pendapat Dia Widarti di atas, maka pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia sebanyak 60 %.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pedagang kaki li- ma ini, maka mungkin ada baiknya penulis pada kesempatan ini mencoba mengutip pendapat dari; Rita Adiwoso Suprato dalam prisma No. 6. tahun 1985 klasifikasi tentang jenis- jenis pedagang kaki lima dengan dangan sebagai berikut :

16). Dia Widarti, 1985, Sektor Informal, Suatu Tinjau- an Ekonomi, Prisma No. 3. LPJES, Jakarta.

Oleh karena kedua ahli di atas kelihatannya sama saja atau terdapat persamaan dalam memberikan klasifikasi mengenai pedang kaki lima.

- Pedang jasa
- Pedang onderdil kendaraan dan besi
- Pedang loak
- Barang-barang kelontong
- Lotto, surat kabar dan buku-buku
- Pakian dan tekstil
- Rokok dan obat-obatan
- Beras
- Makanan jadi
- Dagang dan ikan
- Pedang ayam, kambing, dan binatang lainnya
- Pedang buah-buahan
- Pedang sayur-sayuran dan rempa-rempa

Dan klasifikasi menurut van Peter, tentang pedang kaki lima sebagai berikut :

- Pedang jasa.
- Pedang barang-barang bekas
- Pedang hasil kerajinan
- Pedang/pengecer barang-barang industri
- Pedang makanan jadi
- Pedang bahan makanan



3.1. Daerah Penelitian

Daerah penelitian adalah Kabupaten Bone dengan alasan

bahwa : Objek penelitian terdapat di Kabupaten Bone mantas

dan kegunaannya sangat besar dalam menunjang lancarnya pem-

angunan terutama dalam menanggulangi tenaga-tenaga kerja yang

belum mendapatkan lapangan kerja atau menganggur.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder yang merupakan data dari deret dari waktu

yang bersumber dari beberapa instansi yang terkait.

Jenis data yang dikumpulkan adalah :

- Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bone.

- Perkembangan angkatan kerja menurut umur di Kabupaten

Bone.

3.2.2. Data primer data yang diperoleh dari hasil wawancara

langsung dengan orang yang mempunyai kaitan dengan pem-

bahasan.

3.2.3. Sumber data tersebut dikumpul dari instansi yang ter-

kait sebagai berikut :

- Kantor Statistik Kabupaten Bone.

- Kantor Pemerintahan Bone.

- Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Bone.

- Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Bone.

- Kantor Peradangan Kabupaten Bone.

kerja.

Adapun rumus tersebut untuk mengetahui tingkat kesempatan

$$N = \frac{P_p}{P_e} \times 100\% \quad (17)$$

di mana :

N = Tingkat Kesempatan kerja

P_p = jumlah orang yang bekerja

P_e = jumlah angkatan kerja

gai penguji dengan menggunakan indeks sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis, terutama mempergunakan seba-

3.4. Metode Analisis

salikan penulisan skripsi ini.

- a. dan para pedagang kaki lima atau hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja di sektor informal untuk menyelid-
- b. Interview yaitu wawancara langsung yang dilakukan dianta-
- ten Bone.

Pengurus Tenaga Kerja dalam sektor informal di kabupa-

ngamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Badan

a. Observasi yaitu, yaitu penulis langsung mengadakan pe-

de penelitian yaitu :

Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan meto-

3.3. Metode Pengumpulan data

- Jumlah pengangguran yaitu terjadi karena pencari kerja tidak mengetahui di mana adanya lowongan pekerjaan dan demikian juga pengusaha tidak mengetahui di mana terse-
 diannya tenaga kerja yang sesuai.

- Tingkat pengangguran yaitu namun diantara mereka yang terdorong bekerja, hanya yang dapat dianggap bekerja pe-
 nuan.
- Jumlah angkatan kerja yaitu dipengaruhi oleh jumlah pen-
 duduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga.
- Tingkat kesempatan kerja yaitu dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah.
 permintaan atau demand dalam masyarakat, permintaan ter-
 sebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah.
- Jumlah orang yang bekerja yaitu tergantung dari besarnya
 kelompok yang sama.
- Tingkat kesempatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam ke-
 angkutan kerja yaitu perbandingan antara jumlah

3.5. Konsep Operasional

di mana :
 U_{NN} = Tingkat pengangguran
 P_m = Jumlah Pengangguran
 P_e = Jumlah angkatan kerja pada suatu waktu tertentu

$$U_{NN} = \frac{P_e}{P_m} \times 100 \%$$

nakan rumus sebagai berikut :

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pengangguran digu-

- jumlah angkatan kerja pada suatu waktu tertentu yaitu bagian dari penduduk (usia kerja) baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan.

Sektor informal adalah sektor ekonomi marginal atau kecil-kecilan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

Pertama, kegiatan usaha umumnya sederhana, tidak tergantung pada kerja sama banyak orang dan sistem kerja yang ketat. Kedua, Skala usaha relatif kecil, modal usaha, modal kerja dan omset penjualan umumnya kecil serta dapat dilakukan secara bertahap.

Ketiga, Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha seperti contohnya pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang loak dan sebagainya.

Keempat, tingkat penghasilan di sektor informalnya umumnya rendah walaupun tingkat keuntungannya cukup tinggi, akan tetapi omset penjualannya relatif kecil.

Kelima, keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil, kebanyakan usaha-usaha sektor informal berfungsi sebagai produsen atau penyalur kecil yang langsung melayani konsumen.

Sebagaimana telah diralakan pada bab terdahulu bahwa di daerah kabupaten bone, sama halnya dengan daerah lain-nya di Indonesia setiap tahunnya terjadi kenaikan pertam-bahan penduduk, khususnya pada kelompok umur usia kerja. Ini berarti akan membawa pengaruh, baik dari segi eko-nomi maupun dari segi sosial. Dan yang paling terasa penga-runya adalah dapat menambah pengangguran yang semakin me-ningkat jumlahnya, jika tidak diambil dengan perluasan kesempatan kerja di semua sektor. Sebagaimana diketahui bahwa masalah pengangguran itu bukanlah suatu masalah yang berdiri sendiri melainkan berhubungan erat dengan keadaan ekonomi dan sosial.

Telah menjadi realisasi sekarang bahwa setiap negara atau daerah pasti terdapat kelompok manusia yang menganggur baik yang sifatnya terbuka maupun sifatnya tersembunyi. Ke-jadian ini disebabkan karena ketidak mampuan dari sistim perekonomian pada suatu negara yang bersangkutan untuk membuka kesempatan kerja baru atau tidak selengkapnya anta-ra tenaga kerja dengan kesempatan kerja.

Hal ini kita lihat dari terbatasnya kesempatan kerja dan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertam-pung.

4.1. Sektor Informal dan Tenaga Kerja

di interperkirakan bahwa tingkat pengangguran di kota semakin lebih banyak jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di desa. Hal ini disebabkan karena terjadinya migrasi penduduk yang tidak terkendalikan dari desa ke kota. Para penganggur di kota pada umumnya tenaga muda yang selesai pendidikan, yang tidak berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berusaha masuk atau mencari pekerjaan di sektor informal, tetapi pada umumnya tidak berhasil. Mereka yang tidak berhasil masuk kerja pada sektor informal, sebagai sumber kelangsungan hidupnya. Dan mereka yang tidak memilih masuk bekerja pada sektor informal akhirnya menganggur. Tingginya tingkat pengangguran di kota disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota yang nantinya akan menambah pesatnya penduduk di kota. Dalam hal ini diharapkan untuk lebih meningkatkan dan menambah lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak yang berstat karya agar supaya bertambah jumlah pengangguran dari tahun ke tahun.

Dengan demikian untuk menanggulangi masalah pengangguran dapat ditempuh beberapa cara antara lain :

1. Penulis kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
2. Perluasan sarana pendidikan.

Menurut Sumitro Djoyohadikusumo, bahwa untuk per-
san kesempatan kerja dapat dicapai melalui cara-cara seba-
gai berikut :

1. Merubah pola pertumbuhan produk domestik bru-
to yang tercermin dalam perubahan peranan
masing-masing sektor perekonomian

2. Mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat
guna sesuai dengan pertimbangan sumber modal
dan tenaga kerja di berbagai wilayah tana air.
Sedangkan perluasan kesempatan kerja menurut beliau

dapat juga dilakukan dengan memperbesar jumlah murid usia
sekolah. Usaha ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memperkecil jumlah usia sekolah yang memasuki
pasar tenaga kerja.

2. Peningkatan mutu tenaga kerja melalui pendid-
dikan dan latihan keterampilan.

Yang menjadi masalah sekarang banyaknya murid-murid
atau pelajar bahkan mahasiswa putus sekolah disebabkan

kurang atau kehabisan biaya yang ingin melanjutkan pendid-
dikannya ke jenjang lebih tinggi tetapi karena biaya tidak
mencukupinya, maka terpaksa putus sekolah akibatnya terja-

adalah pengangguran kalau yang bersangkutan tidak mau be-
kerja di sektor informal. Di sektor formalpun belum betul
diterima jadi kesimpulan diharapkan dapat memberikan urur-
an tangan pemerintah untuk membantu menyediakan lapangan
kerja atau kesempatan kerja.

IV.1. Dari tabel tersebut nampak bahwa tahun 1990 terjadi penduduk daerah kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel penduduk daerah kabupaten Bone mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 6% hal ini terjadi sebagian besar penduduk daerah Bone meninggalkan daerahnya atau merantau ke daerah lain ke luar provinsi, sebab pada tahun 1990 daerah kabupaten Bone mengalami kekeringan atau terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan tanah persawahan jadi kering sehingga sebagian besar petani mengalami galkan desanya.

Selanjutnya untuk melihat dari dekat perkembangan Indonesia sendiri. maju maupun negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia bahkan di seluruh dunia, baik di negara-negara jadi di daerah kabupaten Bone, akan tetapi di seluruh pertumbuhan penduduk yang tepat, hal mana bukan saja ter-ruh meskipun bahwa hambatan pada pembangunan ekonomi oleh yang menantikan perbaikan tingkat hidupnya secara menyel-ntimbulkan kekecewaan secara meluas dikalangan masyarakat Hambatan-hambatan dalam pembangunan perekonomian me-perbaikannya melalui pembangunan.

4.2. Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bone
Perubahan jumlah penduduk di kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti adanya ting-kat kelahiran, tingkat kematian dan faktor migrasi. Per-tambahan penduduk setiap tahunnya akan membawa akibat-aktibat pada sektor bidang sosial dan bidang yang diusahakan

Berikut ini akan diperlihatkan dalam tabel mengenai jumlah penduduk yang ada di kabupaten tingkat II Bone berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 1991 sebagai berikut :

FABEL IV. 2.
 JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN
 JENIS KELAMIN DALAM KABUPATEN BONE
 KEADAAN TAHUN 1991

U m u r	Menunjang Angkatan Kerja		J u m l a h (jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
10 - 14	4.732	2.410	7.142
15 - 19	5.597	3.115	8.712
20 - 24	6.922	4.822	11.744
25 - 29	6.249	7.075	16.324
30 - 34	6.848	5.947	12.845
35 - 39	6.329	5.525	11.854
40 - 44	6.195	3.412	9.607
45 - 49	4.132	1.776	5.908
50 - 54	3.385	2.128	5.512
55 - 59	3.212	987	4.199

Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Bone



kecamatan Palangka.

bidang perdagangan yang paling banyak/besar adalah dari
IV. 3. Dalam tabel tersebut tenaga kerja yang bekerja pada
di bidang perdagangan berikut ini dapat dilihat pada tabel
Adapun jumlah penduduk di kabupaten Bone yang bekerja
nurut umur.

Bone menurut tabel IV. 2. tersebut sebesar 93.795 jiwa me-
jumlah secara keseluruhan angkatan kerja di kabupaten

dan untuk angkatan kerja perempuan sebesar 987.
4.199 jiwa untuk angkatan kerja laki-laki sebesar 3.212

da pada pada kelompok umur 55 - 59 tahun yaitu sebesar
puan sebesar 4.882. Angkatan kerja yang paling kurang, bera-

ja laki-laki sebesar 6.922 dan untuk angkatan kerja pemem-
20 - 24 tahun yaitu sebesar 11.744 jiwa untuk angkatan ker-

puan sebesar 5.947 jiwa dan diruntan ketiga kelompok umur
ja laki-laki sebesar 6.848 dan untuk angkatan kerja pemem-

30 - 34 tahun yaitu sebesar 12.845 jiwa untuk angkatan ker-
rutan kedua pertumbuhan angkatan kerja yaitu kelompok umur

jiwa, angkatan kerja perempuan sebesar 7.075 sedangkan diu-
16.324 jiwa untuk angkatan kerja laki-laki sebesar 9.249

terdapat pada kelompok umur 25 - 29 tahun yaitu sebesar
ja di kabupaten Bone jumlah angkatan kerja yang terbesar

Dari tabel IV. 2. Dapat kita lihat bahwa angkatan ker-

TABEL IV.3.

TENAGA KERJA YANG BERGERAK DI BIDANG

PERDAGANGAN TAHUN 1991

No. Kecamatan	Tenaga Kerja Tetap		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	-
	Tenaga Kerja Lepas						
1. Bontocani	-	5	14	1	-	-	-
2. Kahua	-	5	14	6	-	-	-
3. Kajurua	-	14	14	6	-	-	-
4. Salomekko	-	1	1	-	-	-	-
5. Pona	-	6	21	5	-	-	-
6. Libureng	-	21	12	3	-	-	-
7. Mare	-	12	5	-	-	-	-
8. Sibulue	-	5	8	-	-	-	-
9. Barebo	-	8	6	-	-	-	-
10. Cina	-	6	-	-	-	-	-
11. Pore	-	-	-	-	-	-	-
12. Lappariaja	-	8	9	-	-	-	-
13. Lamuru	-	9	-	-	-	-	-
14. Ulaweng	-	-	-	-	-	-	-
15. Palakka	-	132	103	27	13	-	-
16. W. Riatang	-	103	4	1	-	-	-
17. Awang Pone	-	4	-	-	-	-	-
18. T. Siatenge	-	-	-	-	-	-	-
19. Ajangale	-	-	-	-	-	-	-
20. Dua Boccoe	-	-	-	-	-	-	-
21. Cenrana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				337	112	13	-

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah keseluruhan tenaga

kerja yang bekerja ke semua sektor maka berikut ini penulis

perlihatkan dalam tabel IV.4. sebagai berikut :

PENNAGA KERJA YANG BERGERAK DI BIDANG
PERDAGANGAN TAHUN 1990

TABEL IV.4.

No,	Kecamatan	Pennaaga Kerja Tetap		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bontocani	-	-	-
2	Kahua	-	-	-
3	Kajurua	21	-	21
4	Salomekko	8	1	9
5	Tonra	5	1	6
6	Libureng	24	-	24
7	Mare	5	-	5
8	Sibune	1	-	1
9	Barebo	29	2	31
10	Cina	-	-	-
11	Pone	-	-	-
12	Lappariaja	49	5	54
13	Lamuru	9	-	9
14	Ulaweng	-	-	-
15	Palaka	66	12	78
16	T. Riataang	166	28	194
17	Awang Pone	12	-	12
18	T. Siatinge	20	-	20
19	Ajangale	6	-	6
20	Duabocoe	18	-	18
21	Genrana	5	1	6
		Perempuan		54
		Laki-laki		7
		Perempuan		-

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

mengetahuinya.
 Penulis menggunakan metode atau peralatan statistik untuk
 dan tentang formal dan informal yang ada maka berikut ini.
 Untuk mengetahui perhitungan analisis di kabupaten Bone
 4.3. Perhitungan Analisis Tentang Formal dan Informal

Laki-laki masih dominan dibanding dari perempuan.
 sebabkan bahwa jumlah anak yang menempuh pendidikan dari
 banyak dibanding dengan pencari kerja perempuan, hal ini didi-
 pencari kerja dari jenis kelamin laki-laki masih jauh lebih
 Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah

Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Bone.

No.	Tingkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Sekolah Dasar	49	9	58
2.	S M P	202	123	325
3.	S M A	3.424	2.594	6.018
4.	Sarjana Muda	125	186	311
5.	Sarjana	139	125	318
		3.993	3.037	7.037

TABEL IV.5.
 BANYAKNYA PENCARI KERJA TINGKAT
 PENDIDIKAN DI KABUPATEN BONE
 TAHUN 1991

tentang formal dan informal yang ada di kabupaten Bone se-

bagai berikut :

$$N = \frac{P^p}{P^e} \times 100 \%$$

di mana : N = Tingkat kesempatan kerja yang akan dicari

P^p = Jumlah orang yang bekerja

P^e = Jumlah angkatan kerja

Selanjutnya memecahkan rumus tersebut di atas kita gu-

nakan data-data yang diperoleh penulis dari tempat penelti-

an sebagai berikut :

N = Tingkat kesempatan kerja yang akan dicari

P^p = 227012 orang

P^e = 7.030 orang

berarti bahwa : UNIVERSITAS

$$N = \frac{227.012}{7.030} \times 100 \%$$

$$N = 32229 \cdot 100 \%$$

$$N = 3.229 \text{ atau } 32,2 \%$$

Jadi jumlah kesempatan kerja didapat sebanyak 3.229

jenis sektor lapangan kerja baru dapat terserap 50% tenaga

kerja yang ada jadi tiap-tiap lapangan kerja yang ada hanya

dapat menerima tenaga kerja 1 (satu) orang, dari tingkat

pencari kerja yakni 7.030 orang.

ri(mandiri) dan lain yang menuntut mereka masih belum
 luar sektor formal seperti pedagang kaki lima, usaha sendi-
 pada sektor informal dalam hal ini mereka telah bekerja di-
 sebanyak 7.030 orang adalah sebagian besar sudah bekerja
 banyak jumlah pencari kerja yang ada di kabupaten Bone dari
 orang pencari kerja, penting digaris bawahi di sini bahwa
 rata 210 orang yang menganggur setiap tahunnya dari 7.030
 jadi tingkat pengangguran rata-rata 3 % pertahun rata-

$$UnN = \frac{227.012}{7.030} = 0,03 \text{ atau } 3 \% \text{ pertahun}$$

$$UnN = \frac{227.012}{7.030} \times 100 \%$$

diketahui :

- P_e = Jumlah Angkatan kerja
- P_m = Jumlah pengangguran
- UnN = Tingkat pengangguran yang akan dicari

di mana :

$$UnN = \frac{P_e}{P_m} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pengangguran rata-rata yang ada di kabupaten Bone sebagai berikut :

memuaskan, masih tetap statusnya pencari kerja, dan yang ke dua di sini adalah panyaknya pencari kerja yang tidak melaporkan diri mereka setelah bekerja. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan tenaga kerja yang ada dengan tingkat pencari kerja.

Akhir-akhir ini berkembang perbedaan sektor informal dan sektor formal. Sektor formal atau sektor modern mencakup perusahaan-perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi, umumnya berskala besar. Sebaliknya usaha-usaha yang tergolong sektor informal, yaitu kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha relatif kecil tingkat penghasilan di sektor informal umumnya rendah walaupun tingkat-tingkat keuntungan kadang-kadang juga tinggi, akan tetapi karena hasil penjualan relatif kecil, keuntungan absolut umumnya menjadi kecil.

Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha sektor informal bertungsi sebagai produsen atau penyalur kecil yang langsung melayani konsumen, usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang cukur, sebagian tukang becak, sebagian tukang sepatu, tukang loak serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, pembuat kue, barang anyam-anyaman, tukang jahit dan lain-lain.

Dengan demikian semua kegiatan pada sektor informal pada umumnya adalah mengandalkan pada sumber daya manusia atau dengan kata lain adalah padat karya.

Dari data tersebut di atas terlihat pada tabel yaitu bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor informal pada tahun 1990 sebesar 59.981 orang dan merupakan jumlah tenaga kerja yang terbesar yang diserap oleh sektor informal, sedangkan pada tahun 1988 hanya 52.702 orang dan meningkat pada tahun 1989 menjadi 57.044 orang, sedangkan pada tahun terakhir dari tahun penelitian yaitu pada tahun 1991 jumlah tenaga kerja yang diserap, mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 1990, yaitu hanya 59.311 orang. Namun

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Persentase
1988	52.702	23,2
1989	57.044	25,1
1990	59.981	26,4
1991	59.311	26,0
Jumlah	229.038	52,4

TINGKAT TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL
TAHUN 1988 - 1991

TABEL IV.6.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat tenaga kerja di sektor informal, ada baiknya kita lihat tabel berikut ini:

demikian jika kita lihat dari tahun ke tahun pada tabel tersebut secara keseluruhan mengalami perkembangan atau secara rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa peranan sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja cukup membantu dalam menyediakan lapangan kerja bagi pencari kerja yang tidak terserap pada sektor formal.

Sebagai bahan perbandingan maka penulis menampilkan tabel yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor formal yang ada di kabupaten Bone.

TABEL IV. 7.
TINGKAT TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL
TAHUN 1988 - 1991

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Prosentase
1988	57.351	25,2
1989	57.425	25,2
1990	58.810	25,9
1991	53.446	23,5
Jumlah	227.032	48,4

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

jadi usaha formal. Misalnya, warung nasi menjadi restoran, perlu berbeda. Yaitu mendorong sektor-sektor yang ada men- dan kemampuannya, sehingga kebijaksanaan pembinaannya juga usaha-usaha sektor informal tersebut berbeda jenis

bukan kerugian sosial bagi masyarakat. kemanfaatan yang wajar bagi mereka sendiri dan tidak menim- tor informal ini perlu dibina dengan baik supaya memberikan ekonomi dapat membaik. Dengan demikian yang bekerja di sek- penduduk yang masuk pasar kerja sementara menunggu kegiatan dapat bertungsi sebagai katup pengaman menampung ledakan

Bahkan dalam situasi kelesuan ekonomi, sektor informal ja.

yang terserap hanya 48 % dari semua tenaga kerja yang beker- bupaten Bone sekitar 52 %, sedangkan pada sektor formal sektor informal dapat menyerap tenaga kerja yang ada di ka- tensi sektor informal tentu tidak dapat diabaikan. karena Dari ke dua tabel tersebut dapat dilihat bahwa eksis- nya beberapa tenaga kerja yang dimutasikan ke daerah lain. penurunan yaitu hanya 53.446 orang. Hal ini disebabkan ada- sebut juga diperlihatkan bahwa pada tahun 1991 mengalami kutnya menjadi 57.425 orang, namun demikian pada tabel ter- hanya berjumlah 57.351 orang dan meningkat pada tahun bert- tersebut berjumlah 58.810 orang, sedangkan pada tahun 1988 akan jumlah terbesar dari tahun sebelumnya, pada tahun terlihat pada tahun 1990 jumlah tenaga kerja tersebut meru- Demikian pula halnya tenaga kerja pada sektor formal

pedagang kaki lima menjadi toko, untuk itu tentu diperlukan dukungan modal dan latihan managerial dan pengetahuan teknis. Peringatan ini di samping meningkatkan kemampuan dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, juga cenderung untuk menambah kesempatan kerja dan lebih mudah dicatat sebagai wajib pajak.

Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal yang sama. Misalnya tukang sayur dapat dilengkapi dengan gerobak yang lebih besar dan alat pendingin, sehingga dagangan yang tidak terjual habis masih dapat dijual besok harinya. Sektor informal di bidang produksi dibantu melalui penyediaan bahan baku dan kelancaran pemasaran.

Memang dalam hal-hal tertentu, ada beberapa usaha sektor informal yang menimbulkan kerugian sosial. Misalnya pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, tukang becak yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan tidak tertib, dan usaha produksi yang mencemarkan lingkungan. Pemecahannya adalah dengan mengadakan rekayasa, yaitu menempatkan di lokasi baru, dalam hal ini perlu dipertimbangkan faktor konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi bagi yang berusaha di sektor tersebut. di satu pihak perlu perlakuan manusiawi para petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi peraturan perlu diterapkan.

Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalikan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke



bidang usaha lain. Bisa terjadi seseorang terpaksa memilih usaha sektor informal karena orang tersebut tidak melihat atau khawatir mengambil resiko untuk beralih ke alternatif lain. Akan tetapi dengan memblarkan orang tersebut dalam pekerjaan itu, sama artinya dengan memblarkan untuk tidak dapat maju. Dalam hal ini tanggung jawab Pemerintah tidak terbatas pada pemberian penjelasan, akan tetapi juga pada penyediaan fasilitas latihan dan prasarana usaha yang bersangkutan bisa beralih pekerjaan.

Untuk daerah kabupaten Bone jumlah orang bekerja dan yang menganggur/mencari pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL IV. 8.
 JUMLAH PENGANGGUR DAN PEKERJA MENURUT
 JENIS KELAMIN DI KABUPATEN
 BONE 1990

Angkatan Kerja	Jenis Kelamin		P e k e r j a	Penganggur
	Laki-Laki	Perempuan		
	49.612	37.909	87.521	
	1.725	586	2.311	
	47.887	37.323	85.210	
Jumlah				

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Dari tabel IV.8. terlihat jumlah pekerja di daerah kabupaten Bone pada tahun 1990. Di mana pekerja untuk perempuan sebesar 37.323 orang dan pekerja laki-laki sebesar 47.887 orang sehingga jumlah keseluruhan angkatan kerja yang bekerja sebesar 85.210 orang.

Sedangkan pihak lain yaitu penganggur laki-laki sebesar 1.725 orang dan untuk pengangguran perempuan sebesar 586 orang, sehingga penganggur keseluruhan 2311 orang.

Meraka yang termasuk pekerja adalah yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak bekerja atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah ; pekerja tetap pada kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit. Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawahnya, orang yang bekerja dalam bidang keahlian seperti dokter, konsultan, dan lain-lain. Sedangkan penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

5.1. Simpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu sebagai inti dari pada pembahasan ilmiah ini sebagai berikut :

1. Akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, maka tenaga kerja pun mengalami peningkatan, di mana pada akhir tahun 1990, jumlah tenaga kerja yaitu sebesar 227.052 jiwa. Dan pada yang sama pula jumlah pencari kerja baru yang masuk kesempatan kerja yaitu sebesar 7.037 jiwa.

2. Perkembangan kesempatan kerja pada akhir tahun

1990, dapat dilihat yaitu sebesar 3.239 kesempatan

kerja yang tercipta ini juga termasuk kesempatan

kerja yang tercipta ini juga termasuk kesempatan

kerja pada sektor informal, sementara dengan besar-

nya tingkat kesempatan kerja yang tersedia, maka

tingkat pengangguran hanya sebesar 3 % pertahun.

3. Peranan sektor informal sebagai salah satu alter-

natif dalam menampung para tenaga kerja yang belum

mendapatkan pekerjaan, sangat besar manfaatnya. Di

mana pada akhir tahun 1991 jumlah tenaga kerja yang

terserap pada sektor informal yaitu sebesar 59.311

jiwa dari berbagai lapangan pekerjaan yang ada di

1. Melihat perkembangan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan tiap tahun, maka perlu secepatnya untuk mencari penanggulangan baik melalui program Keluarga Berencana (KB), maupun melalui pendidikan penduduk dari daerah yang dapat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya.
2. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk dalam kesempatan kerja atau lowongan kerja yang tersedia untuk menampung kenaikan tenaga kerja tersebut. Sehingga dengan demikian angka pengangguran mengalami penurunan.
3. Peranan sektor informal cukup besar dalam menanggulangi kenaikan jumlah tenaga kerja yang masuk dalam kesempatan kerja. Oleh karena itu sektor informal perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang, sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan kerja dengan demikian menanggulangi pertambahan pengangguran di kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arrie Benggolo, M.P. 1973. Tenaga Kerja dan Pemanfaatan
Penerbit Yayasan Jasa Karsa, Jakarta.
2. Djoyohadikusumo, Sumitro. 1974. Indonesia dalam Pema-
nanaan Dunia Kini dan Masa Depan. LPJES, Jakarta.
3. Hidayat. 1984. Ankkatan Kerja di Indonesia, Pusat Pene-
litian UGM, Jakarta.
4. Juwono Sutopo, 1985, Masyarakat Peningkatan, Prisma, LPJES
Jakarta.
5. Kusumoswinho Sisjatmo, 1981. Dasar-Dasar Demokrati,
Lembaga Demokrati Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, Jakarta.
6. Manning Chris, 1985. Urbanisasi Pengangguran dan Sektor
Informal di Kota, PT. Gramedia, Jakarta.
7. Munzinger Peter, 1984. Pedangan yang Kreatif. Penerbit
Lembaga Pembangunan, Jakarta.
8. Nitisastro Wijoyo. 1974. Soal Penduduk dan Pembangunan
Ekonomi Indonesia, Pustaka Ekonomi/Pembangunan
Jakarta.
9. Papayungan, M.M. 1984. Sumber Daya Manusia, Jilid I
Ujung Pandang.
10. Stimanjuntak Payaman J, 1985. Pengantar Ekonomi Sumber
Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta.
11. Syarif Kartini, 1985. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Sektor
Informal, Prisma No. 6.

12. Squire, Zainab, Chris Manning, 1985. Angkatan Kerja di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.
13. Tri Cahyono, Mambang, Pengembangan Kesempatan Kerja.
 14. Todaro Michael P. 1983. Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
15. Piter Yan, Karafir, 1977. Pemupukan Modal Pedasana Ka-ki Lima, Penerbit Rakutitas Ilmu-Ilmu Sosial UI Jakarta.
16. Priyono Ptiptonerjanto, Artis Anata, 1986. Sektor In-Formal Suatu Tinjauan Ekonomi. LPJES, Jakarta.
17. Widarti Dia, 1985. Angkatan Kerja di Indonesia: CV. Rajawali, Jakarta.
18. Wirosarjono Soetjipto, 1985. Pengertian Sektor Infor- mal. Prisma No. 3. Yogyakarta.
19. Yudo Swasono, 1983. Metode Perencanaan Kerja. BPPF

JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN BONE TAHUN 1991

Lampiran 1.

No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	Bontocani	5.216
2	Kahu	9.533
3	Kajurua	9.177
4	Salomekko	6.293
5	Ponra	5.777
6	Libureng	8.923
7	Maré	6.839
8	Sibuné	9.071
9	Barebo	7.509
10	Cina	7.512
11	Ponré	4.683
12	Lappariaja	16.041
13	Lamuru	13.791
14	Ulaweng	15.244
15	Palokka	13.908
16	T. Riatang	15.244
17	Awang Bone	13.908
18	T. Siatange	20.943
19	Ajangale	16.598
20	Dua Boccoe	12.664
21	Cenrana	9.249
		227.032

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

PERKEMBANGAN TENAGA KERJA MENURUT
KECAMATAN DI KABUPATEN BONE
TAHUN 1987 - 1990

No	Kecamatan	1988	1989	1990	1991
1	Bontocani	4.313	4.239	4.471	5.216
2	Kahua	7.702	7.702	8.171	9.533
3	Kajurua	7.708	7.507	7.866	9.177
4	Salomekka	5.724	5.084	5.394	6.293
5	Ponra	4.750	4.660	4.952	5.777
6	Libureng	7.243	7.070	7.648	9.071
7	Mare	5.839	5.637	5.862	6.839
8	Sibulne	7.746	7.508	7.775	9.071
9	Barebo	6.293	6.142	6.435	7.509
10	Cina	6.293	6.125	6.439	7.512
11	Pore	4.048	3.932	4.044	4.683
12	Lappariaja	11.739	13.391	13.006	16.041
13	Lamuru	13.903	11.481	11.821	13.791
14	Ulaweng	13.019	12.609	13.006	15.244
15	Palakka	11.785	11.481	11.921	13.908
16	P. Riayang	17.976	17.388	17.951	20.943
17	Awang Fone	10.405	10.061	10.410	12.145
18	P. Satinge	13.629	13.186	13.642	15.916
19	Ajangale	14.266	13.820	14.227	16.598
20	Dua Boccoe	10.815	10.456	10.855	12.664
21	Centrana	7.914	7.664	7.928	9.249

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

REALISASI PENGELUARAN DAERAH OTONOM TINGKAT II BONE
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DALAM MILIAR RUPIAH

Jenis Pengeluaran	Banyaknya (Rp)
<p>A. PENGELUARAN RUTIN</p> <p>1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Pengeluaran 4. Belanja Pengeluaran Dinas 5. Belanja Lain-lain 6. Ansuran Pinjaman Hutang dan Bunga 7. Gaji subsidi dan Sumbangan Kedarifan 8. Bantuan dan Odestam 9. Pengeluaran tidak Termasuk Bagian Lain 10. Pengeluaran tidak Disangka</p>	<p>15.739.923 13.014.426 1.249.348 220.675 398.057 832.295 - 7.606 17.905 - 5.976.001</p>
<p>B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</p> <p>1. Pengertian dan Pengaliran 2. Indus tri 3. Pertambahan 4. Pertambahan dan Parawisata 5. Perdagangan dan Koperasi 6. Tenaga Kerja Permukiman Kembali 7. Pembangunan Daerah 8. Asas 9. Pendidikan Generasi Muda Kebudayaan Nasional 10. Kesehatan Sosial Peranan Wanita, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 11. Perumahan Rakyat dan Permukiman 12. Huk um 13. Keamanan dan Keterliban Umum 14. Penerangan Perusahaan Komunikast Sosial 15. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penelitian 16. Aparatur Pemerintah 17. Pembangunan Dunia Usaha 18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 19. Subsid Bantuan Pembangunan Daerah Bawah 20. Penyebaran Kembali Pinjaman</p>	<p>161.227 - 9.235 - 80.410 364.372 55.359 429.584 - 90.000 3.705348</p>
<p>Jumlah</p>	<p>24.432.348</p>
<p>C. URUSAN DAN PERHITUNGAN (UKP)</p>	<p>24.432.348</p>

Sumber : Kantor Kepala Daerah Tingkat II Bone